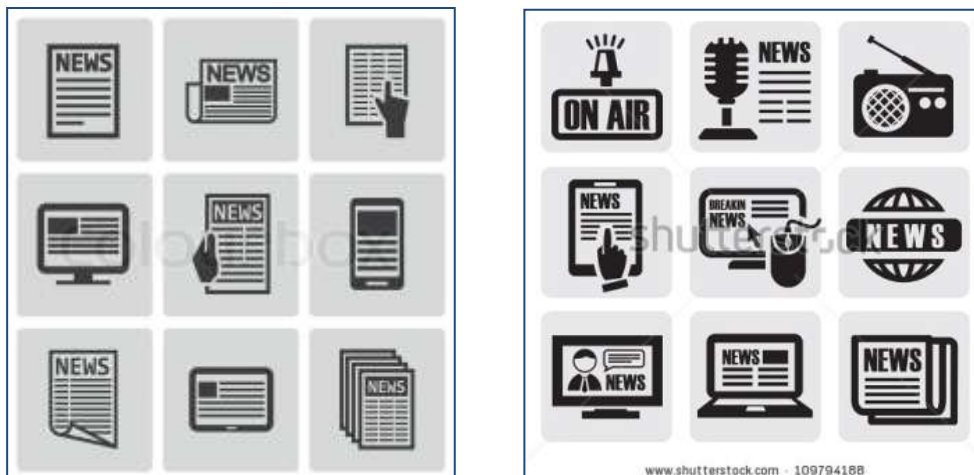




e-Newspaper Media Online

Ekonomi

Senin, 14 Agustus 2017



**Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
Jakarta, Bappenas
2017**

Daftar Isi

1. PASAR MODAL BERKEMBANG PESAT (*Media Online Kompas*)
2. PELAMBATAN PERTUMBUHAN KONSUMSI RUMAH TANGGA PERLU DIWASPADAI (*Media Online Kompas*)
3. BURSA HARUS SOKONG PEMBANGUNAN (*Media Online Media Indonesia*)
4. PASAR MODAL BERKEMBANG PESAT (*Media Online Republika*)
5. KONSOLIDASI AGENDA INTEGRASI EKONOMI (*Media Online Republika*)
6. EKONOMI TETAP BERPELUANG TUMBUH DI ATAS 5,2% (*Media Online Suara Pembaruan*)
7. KETIMPANGAN EKONOMI, PEMERINTAH BUTUH DUKUNGAN MASYARAKAT (*Media Online Suara Pembaruan*)

KEUANGAN

Pasar Modal Berkembang Pesat

JAKARTA, KOMPAS — Dalam 40 tahun terakhir, perkembangan pasar modal sangat pesat, baik dilihat dari pencapaian indeks maupun dilihat dari jumlah investor. Pada usia yang sudah dapat dikatakan dewasa ini, peran pasar modal terhadap pembangunan diharapkan semakin besar, terutama untuk menyediakan pendanaan infrastruktur.

"Pemerintah sedang gencar melaksanakan pembangunan berbagai sarana infrastruktur pendukung, seperti pelabuhan, jalan tol, pembangkit listrik, jalur kereta api, dan bandara. Dana yang dibutuhkan tidak sedikit, tidak dapat mengandalkan APBN saja," kata Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso di Jakarta, Minggu (13/8), ketika memperingati 40 tahun diaktifkan kembali pasar modal.

Untuk mendukung peran pasar modal tersebut, OJK telah mengeluarkan beberapa peraturan OJK yang menunjang pembiayaan jangka panjang dari pasar modal. Peraturan tersebut, misalnya, tentang dana investasi multi aset berbentuk kontrak investasi kolektif. Selain itu, ada pula aturan yang memberikan kesempatan bagi perusahaan dengan aset berskala kecil dan menengah untuk juga mendapatkan pembiayaan dari pasar modal serta Peraturan OJK tentang Dana Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Peraturan ini diterbitkan untuk menyediakan skema investasi kolektif dari berbagai proyek infrastruktur. OJK juga telah memberikan pernyataan efektif untuk tiga produk pendukung pembangunan proyek infrastruktur.

OJK menetapkan kebijakan yang memungkinkan pembiayaan infrastruktur dapat diopti-

malisasi melalui pemanfaatan beberapa instrumen yang sudah ada, seperti kontrak investasi kolektif ataupun peluncuran beberapa instrumen baru, misalnya surat berharga perpetual ataupun obligasi berbasis proyek.

Hingga akhir pekan lalu, nilai kapitalisasi Bursa Efek Indonesia tercatat sebesar Rp 6.330 triliun. Sepanjang tahun ini, investor asing membukukan pembelian bersih saham sebesar Rp 4,2 triliun.

Banteng Wulung

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Bursa Efek Indonesia Tito Sulistio juga meresmikan Banteng Wulung. Patung banteng hitam ini diletakkan di Atrium Gedung BEI dan diharapkan dapat menjadi salah satu destinasi wisata finansial. Tito menjelaskan, Banteng Wulung ini terbuat dari fosil kayu yang sudah berusia 2,5 juta tahun yang sesuai dengan penelitian dari Institut Teknologi Bandung. Beratnya mencapai 7 ton.

"Patung banteng di tempat lain terbuat dari perunggu. Patung ini terbuat dari fosil yang berasal dari Banteng. Pembuatnya adalah pemahat dari Bali dan diambil dari cerita Pasundan," ujar Tito. Menurut legenda Banteng Wulung di tanah Pasundan, banteng tersebut gagah dan berwarna hitam, dapat berlari secepat angin, juga sakti. Selain itu, Banteng Wulung juga memberikan kesejahteraan.

Menurut Tito, banteng melambangkan optimisme terhadap pasar modal dan perekonomian secara keseluruhan. Melalui ikon baru ini, Tito berharap pasar modal Indonesia dapat lebih dikenal masyarakat sehingga literasi masyarakat terhadap pasar modal dapat terus meningkat. (JOE)

PASAR MODAL BERKEMBANG PESAT

Perekonomian nasional dalam 40 tahun terakhir, perkembangan pasar modal sangat pesat, baik dilihat pencapaian indeks maupun dilihat dari jumlah investor. Pada usia yang sudah dapat dikatakan dewasa ini, peran pasar modal terhadap pembangunan diharapkan semakin besar, terutama untuk menyediakan pendanaan infrastruktur. Pemerintah sedang gencar melaksanakan pembangunan berbagai sarana infrastruktur pendukung, untuk mendukung peran pasar modal tersebut, OJK telah mengeluarkan beberapa peraturan OJK yang menunjang pembiayaan jangka panjang dari pasar modal

Hashtag Berita :

#BursaSaham #OtoritasJasaKeuangan
 #PertumbuhanEkonomiNasional
 #MoneterKeuanganNegara #Investasi
 #PelaksanaanProyekNasional #PasarModal
 #StabilitasEkonomiIndonesia
 #PaketKebijakanEkonomiNasional

KOMPAS

Senin

AMANAT HATI NURANI RAKYAT

14 Agustus 2017

INDIKATOR EKONOMI

Pelambatan Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga Perlu Diwaspadai

JAKARTA, KOMPAS — Pelambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga perlu diwaspadai apabila terjadi secara berkelanjutan. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah mulai sekarang diharapkan menyusun solusi jangka pendek dan panjang yang terintegrasi.

Hal itu diungkapkan anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), Hendri Saparini, di sela-sela diskusi Daya Beli Terjaga, Masyarakat Belanja Lebih Cerdas, yang diselenggarakan oleh Forum Merdeka Barat 9, Sabtu (12/8), di Jakarta. Pembicara lain ialah Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto, Ketua Asosiasi E-Commerce Indonesia Aulia E Marinto, dan

pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Faisal Basri.

Mengacu data BPS, pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada triwulan II-2017 sebesar 4,95 persen. Pencapaian ini naik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, yaitu 4,94 persen.

Konsumsi rumah tangga menyumbang 2,65 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua 2017, yakni 5,01 persen. Kategori pengeluaran restoran dan hotel tumbuh 5,87 persen, sedangkan makanan dan minuman 5,24 persen.

Menurut Hendri, data pelambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga harus dilihat lebih jeli siapa kontributornya.

Apabila penyumbang penting adalah kelompok bawah dan diproyeksi terus terjadi, tingkat kewaspadaan pemerintah perlu ditambah.

Sejumlah faktor

Dia menyebutkan, kelompok bawah mengurangi konsumsi karena sejumlah faktor penyebab, antara lain harga kebutuhan pokok, bahan bakar minyak jenis tertentu, dan tarif dasar listrik meningkat. Faktor lain yang harus diperhatikan adalah nilai tukar upah buruh dan petani yang mengalami penurunan.

Hendri juga menyorot pencapaian pengeluaran dari sisi investasi. Dengan porsi 31,36 persen terhadap produk domestik

bruto, investasi pada triwulan II-2017 tumbuh 5,35 persen. Dia mempertanyakan apakah pencapaian tersebut ikut didorong oleh konsumsi yang tumbuh melambat.

"Kelompok bawah ini harus menjadi perhatian, apalagi mereka yang tergolong dekat angka kemiskinan. Apabila mereka mengurangi konsumsi, itu harus diwaspadai," ujarnya.

Faisal Basri menekankan bahwa belanja yang berkurang bukan berarti konsumsi masyarakat menurun. Masyarakat bisa saja mengalihkan pendapatan mereka untuk tabungan.

Masyarakat kelompok bawah hanya berkontribusi sekitar 17 persen terhadap total konsumsi

rumah tangga. Anggota keluarga mereka selang-seling ikut bekerja agar membantu menopang ekonomi. Dengan demikian, kualitas hidup menurun.

Sementara itu, Aulia E Marinto mengemukakan, pusat perbelanjaan atau mal fisik tetap diminati warga. Sejumlah warga memilih untuk membeli barang di sana, kemudian menjual kembali melalui platform daring. Gerai-gerai konvensional tetap memperoleh untung.

Suhariyanto menyebutkan, kelompok menengah ke atas sekarang mempertimbangkan berbagai aspek sebelum memutuskan konsumsi. Sebagai gantinya, dana mereka di perbankan cukup tinggi. (MHD)

Pemerintah dalam perlambatan pertumbuhan konsumen rumah tangga perlu diwaspadai apabila terjadi secara berkelanjutan. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah mulai sekarang diharapkan menyusun solusi jangka pendek dan panjang yang terintegrasi. Selain itu, mengacu pada data BPS (Badan Pusat Statistik) pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada triwulan II-2017 sebesar 4,95 persen. Pencapaian ini naik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, yaitu 4,94 persen

Hashtag Berita :

#KawasanEkonomiKhusus

#DayaBeliMasyarakat

#StabilitasEkonomiIndonesia

#BadanPusatStatistik

#PertumbuhanEkonomiNasional

#KesejahteraanMasyarakat

#ProgramKemiskinan



Senin, 14 Agustus 2017

Bursa Harus Sokong Pembangunan

Nilai kapitalisasi hingga saat ini telah mencapai lebih dari Rp6.000 triliun. Peningkatan yang melebihi 40% itu menunjukkan potensi dalam memenuhi kebutuhan pendanaan.

Ferry Wicakanti
ferry@mediaindonesia.com

KEBERADAAN pasar modal Indonesia selama 40 tahun telah memberikan banyak manfaat bagi emiten dan investor. Kini giliran pasar modal dituntut memberikan kontribusi lebih besar guna menyokong pembangunan yang sedang dikerjakan pemerintah.

Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso memaparkan bahwa pada 4 dasawarsa lalu, tepatnya 1977, indeks harga saham gabungan (IHSG) baru berada di level 98,06. Pada penutupan perdagangan akhir pekan lalu, IHSG sudah berada di level 5.786,11, atau meningkat lebih dari 5.800%. Nilai kapitalisasi pasar, yang pada 1977 baru mencapai Rp1,73 miliar, per 11 Agustus kemarin sudah mencapai Rp4.319,55

triliun, atau meningkat lebih dari 250.000%.

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, jumlah dana yang dapat dibayarkan berbagai perusahaan dari pasar modal, baik melalui penerbitan saham maupun obligasi korporasi, telah mencapai Rp623 triliun. Nilai kapitalisasi hingga saat ini telah mencapai lebih dari Rp6.000 triliun. Pengalangan yang telah lebih dari 40% menunjukkan potensi dalam memenuhi kebutuhan pendanaan.

Saat ini, ungkap Wimboh, pemerintah sedang gencar melakukan pembangunan berbagai sarana infrastruktur penunjang seperti pertambangan, tol, pembangkit listrik, jalur kereta api, dan bandara. Keterbatasan pembiayaan pembangunan infrastruktur tersebut dalam lima tahun diperkirakan lebih dari Rp5.000 triliun dan tidak akan cukup mengandalkan APBN, yang dalam lima ta-

Anak muda agar lebih didukasi, diberi akses informasi hingga di tingkat kecamatan atau desa sehingga bisa berpartisipasi di pasar modal.

han diperkirakan hampir 1.500 triliun.

"OJK telah menetapkan kebijakan yang memungkinkan pembiayaan infrastruktur dapat dioptimalkan melalui pemanfaatan beberapa instrumen yang telah ada seperti kemak (tawaran kolektif), surat berharga perpetual, maupun proyek bond. Selain itu, tipe jenis produk pasar modal terbaru juga telah dirumuskan, dengan nilai mencapai Rp12,8 triliun, yaitu dua bentuk instrumen kolektif-efek bergangsa aset (KIK-IBA) dan satu reksa dana penyertaan terbatas (ODPT)," jelas Wimboh dalam acara Stock Code Fun Walk, memperingati

40 tahun dilaksanakannya kembali pasar modal Indonesia, di Jakarta, kemarin.

Jangkauan lebih luas

Menteri Keuangan Sri Mulyani yang hadir dalam acara itu berharap anak muda lebih didukasi, diberi akses informasi hingga kepada mereka yang berada di tingkat kecamatan atau desa sehingga bisa berpartisipasi menggunakan tabungan di pasar modal. "Saya juga berharap dengan dilibatkannya galeri berbagai produk Indonesia, kepentingan saham dan partisipasi masyarakat di dalam memilih dan mengikuti perdagangan saham bisa semakin digerakkan sehingga menciptakan rasa memiliki terhadap pasar modal dan bursa efek Indonesia," ujar Sri Mulyani.

Direktur Utama BHI Suprajito menegaskan BHI akan akan memberikan edukasi kepada agen ritilik. Dengan jumlah yang sangat besar, agen ritilik bisa sangat sukses dalam memberikan edukasi ke masyarakat desa. Pada tahap kedua, Suprajito menekankan pemerintah akan memanfaatkan jaringan di pedesaan dalam melayani pendanaan rekening dana nasabah. (*/E-1)



40 TAHUN PASAR MODAL INDONESIA: Menteri Perekonomian Daimi Nasution (kiri) bersama Menteri Sri Mulyani Indrawati (tari) berpose di antara barterng wulung di halaman Gedung BII, Jakarta, kemarin. Dalam memperingati 40 tahun pengaktifan kembali pasar modal Indonesia, BII mempromosikan ikon barterng wulung dari tali kayu yang berusia lebih dari 2,5 juta tahun asal Letek, Banten.

Keberadaan pasar modal Indonesia selama 40 tahun telah memberikan banyak manfaat bagi emiten dan investor. Kini giliran pasar modal dituntut memberikan kontribusi lebih besar guna menyokong pembangunan yang sedang dikerjakan pemerintah dan Nilai kapitalisasi hingga saat ini telah mencapai lebih dari Rp6.000 triliun. Peningkatan yang melebihi 40% itu menunjukkan potensi dalam memenuhi kebutuhan pendanaan

Hashtag Berita :

- #MoneterKeuanganNegara
- #PasarModal
- #BursaSaham
- #OtoritasJasaKeuangan
- #PaketKebijakanEkonomiNasional
- #PertumbuhanEkonomiNasional
- #Investasi
- #PelaksanaanProyekNasional
- #StabilitasEkonomiIndonesia

REPUBLIKA

SENIN, 14 AGUSTUS 2017

Pasar Modal Berkembang Pesat

● BY SETYANINGSIH

Kapitalisasi pasar modal telah mencapai Rp 6.400 triliun.

JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan, pasar modal Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pasar modal telah menjadi tujuan investasi bagi para investor baik dari dalam maupun luar negeri.

Rietus Dewanti Komisaris OJK Winiboh Santoso menyebutkan, ada beberapa indikator yang menunjukkan penytis perkembangan pasar modal Indonesia. Winiboh menjelaskan, indeks harga saham gabungan (IHSG) berada di level 5.766,13 per 11 Agustus 2017. Sebelumnya, pada 1977, saat pasar modal baru diaktifkan kembali, IHSG berada pada level 98,00. "Ini meningkat lima ribu persen," kata Winiboh dalam acara Peringatan 40 Tahun diakhirakan kembali Pasar Modal Indonesia, di Jakarta, Ahad (13/8).

Indikator lainnya, kata Winiboh, nilai kapitalisasi pasar yang melonjak drastis. Pada 1977, nilainya baru mencapai Rp 2,73 miliar. Sedangkan, pada Agustus 2017 sudah mencapai Rp 6.340,55 triliun atau meningkat 230 ribu persen.

Winiboh menambahkan, pasar modal sudah berkembang menjadi salah satu sumber pendanaan jangka panjang



40 TAHUN Direktur Utama BIC Tito Sulasto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Rietus Dewanti Komisaris Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Winiboh Santoso, dan Menteri Koordinator Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Bambang Brodjonegoro dalam peringatan 40 tahun pasar modal, di Jakarta, Ahad (13/8).

bagi dunia usaha dan pemerintah. Berbagai program seperti pembangunan infrastruktur pun turut didorong menggunakan pendanaan dari pasar modal.

"Tantangan sedang proses melakukan pembangunan ini infrastruktur seperti jembatan, jalan tol, pembangkit listrik, jalur kereta api, bandara, dan lainnya yang tentu membutuhkan dana tidak sedikit,"

kata Winiboh. "Ini merupakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) saja tidak cukup menutupi kebutuhan anggaran untuk infrastruktur. Sebab, APBN yang tersedia dalam lima tahun diperkirakan hanya Rp 1.500 triliun. Sedangkan, kebutuhan pembangunan diperkirakan lebih dari Rp 5 ribu triliun.

"Maka, salah satu strategi yang saat ini dipilih melalui pemanfaatan berbagai instrumen pembiayaan di sektor pasar modal. Melalui instrumen konvensional, seperti sukuk dan obligasi hingga instrumen investasi syariah," ujarnya. Berbagai instrumen yang dikembangkan di antaranya dana investasi infrastruktur berbentuk KIK, efek beragunan (ERA), reksa dana penyertaan terbatas, hingga reksa dana target waktu.

Ta berbagai pasar modal Indonesia bisa menghadapi persaingan dan tantangan global.

"Saya yakin kita mampu melawat menjadi salah satu pasar modal terbaik di dunia," kata Winiboh.

OJK telah mengeluarkan banyak peraturan untuk mendukung perkembangan pasar modal. Beberapa yang sudah dikeluarkan adalah Peraturan OJK (POJK) Nomor 4 tahun 2017 tentang Dana Investasi Multi Aset Berhentuk Kontrak Investasi Kolektif yang diterbitkan sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. OJK juga telah menerbitkan POJK Nomor 23 dan 24 Tahun 2017 yang bertujuan memfasilitasi kemampuan bagi emiten dengan aset skala kecil dan menengah dalam memperoleh pendanaan melalui pasar modal.

"OJK juga telah menetapkan kebijakan yang meningkatkan partisipasi infrastruktur sebagai objek investasi melalui pemanfaatan beberapa instrumen yang telah ada, seperti kontrak investasi kolektif," kata Winiboh. Regulator, kata dia, terus mendorong pola peningkatan

jumlah investor domestik baik ritel maupun institusi terutama melalui kampanye edukasi, seperti seminar dan bursa pensiun.

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulasto menyatakan, nilai kapitalisasi pasar modal Indonesia tumbuh 2,34 juta kali menjadi Rp 6.400,11 triliun. Pertumbuhan itu meningkat sejak BEI diaktifkan kembali pada 11 Agustus 1977.

Nilai kapitalisasi menunjukkan nilai efek yang tercatat di bursa saham. "Pada 1977 nilai kapitalisasi pasar modal Indonesia baru Rp 2,73 miliar, per Juli 2017 sudah mencapai Rp 6.400,11 triliun," ujarnya.

Selanjutnya, rata-rata volume transaksi IHSG pekan lalu mencapai 0,98 persen menjadi 8,04 miliar unit saham dari 7,31 miliar unit saham. Rata-rata frekuensi transaksi di bursa juga tumbuh 3,68 persen menjadi 206,03 ribu kali selama sepekan terakhir dibandingkan 206,03 ribu kali transaksi pada pekan sebelumnya.

BEI sepanjang tahun ini telah merekrut 37 galeri investasi. Dengan begitu, sudah ada 197 galeri di seluruh Indonesia saat ini. Galeri investasi diberikan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat mengingat pasar modal.

Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap dengan dilaksanakannya galeri investasi di berbagai pelosok Indonesia, kepastian usaha dan partisipasi masyarakat bisa diperluas. "Sehingga, dapat meningkatkan apa yang disebut kita memiliki terhadap pasar modal dan Bursa Efek Indonesia." ■ www.republika.co.id

Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan, pasar modal Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pasar modal telah menjadi tujuan investasi bagi para investor baik dari dalam maupun luar negeri. Selain itu indeks harga saham gabungan (IHSG) ber ada di level 5.766,13 per 11 Agustus 2017. Sebelumnya, pada 1977, saat pasar modal baru diaktifkan kembali, IHSG berada pada level 98,00 dan pasar modal sudah berkembang menjadi salah satu sumber pendanaan jangka panjang bagi dunia usaha dan pemerintah. Berbagai program seperti pembangunan infrastruktur pun turut didorong menggunakan pendanaan dari pasar modal.

Hashtag Berita :

- #PasarModal
- #BursaSaham
- #MoneterKeuanganNegara
- #OtoritasJasaKeuangan
- #PaketKebijakanEkonomiNasional
- #PertumbuhanEkonomiNasional
- #Investasi
- #PelaksanaanProyekNasional
- #StabilitasEkonomiIndonesia

REPUBLIKA

SENIN, 14 AGUSTUS 2017

Konsolidasi Agenda Integrasi Ekonomi

Kawasan ekonomi yang berpotensi muncul sebagai sebuah kekuatan ekonomi dunia, maka itu adalah Asia Tenggara. Jika Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) dipertimbangkan sebagai satu negara, mungkin kawasan ini sudah berada di jajaran sepuluh besar perekonomian dunia. Apalagi, sejak 2015 lalu, ASEAN sudah pula menggulirkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), sebagai langkah awal integrasi ekonomi di kawasan. Hanya saja, sampai sekitar dua tahun berjalan, MEA terkesan masih berjalan di tempat.

Pondasi terhadap pencapaian ASEAN, khususnya di bidang perekonomian, selama 50 tahun terakhir jelas sangat berbeda. Berat gelas bernilai sangat berbeda. Berat gelas bernilai sangat berbeda. Berat gelas bernilai sangat berbeda.

President ASEAN Business Council, Tan Sri Mohd Muhiyuddin, dalam paparannya di *Makalah Awalan* menjelaskan sampai saat ini ASEAN belum benar-benar berfungsi sebagai pasar tunggal dan basis produksi. Sejumlah tarif perdagangan tetap diberlakukan dan hambatan non-tarif barang justru bermunculan, bahkan setelah MEA di gulirkan. Biaya perdagangan intra regional tetap tinggi.

Muhiyuddin, yang juga Chairman ASEAN Business Advisory Council (ABAC) Malaysia, memandatkan semua ekonomi yang dipertimbangkan ASEAN dalam mempersiapkan perlebaran ekonomi sampai 2025. Asumsi simulasi amaranan, tarif menjadi nol, biaya perdagangan intra regional

tidak mungkin sampai sebesar 20 persen, dan hambatan non-tarif dipertimbangkan sampai sepuluh. Namun, memertinya, sejak MEA bergulir yang terjadi justru sebaliknya. Masih banyak aturan dan regulasi yang justru menghambat investasi serta arus tenaga kerja terampil di dalam kawasan.

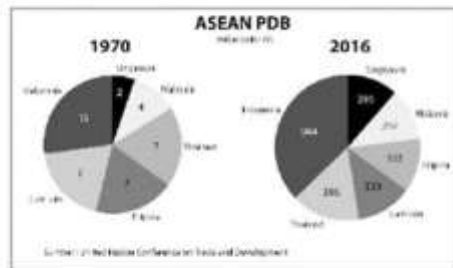
ASEAN, lanjut Muhiyuddin, perlu berpartisipasi dan menghadapi capaianya perubahan yang terjadi, dan bila perlu mengajukakan kembali rencana dan tahapan integrasi ekonomi. Proses integrasi ekonomi secara gradual, yang selama ini berlangsung, dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan ekspektasi dunia usaha dan bisnis yang menginginkan kecepatan.

terlebih dari perkiraan di dunia usaha bisnis. Ong Keng Yong, Deputy Chairman S. Rajaratnam School of International Studies, dalam paparannya di *The Straits Times*, menekankan ASEAN perlu mengkonsolidasikan lagi rencana dan agenda integrasi ekonomi, termasuk melalui MEA. Dibutuhkan arus prekursorisme dan anti-globalisasi di dunia, ASEAN tetap perlu menjaga stabilitas di kawasan.

Insentif MEA yang sudah bergulir, dinilai Ong perlu diperkuat dengan penurunan perundang-undangan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) antara ASEAN dengan negara mitra ASEAN, Jepang, Korea Selatan, India, Australia, dan Selandia Baru. Rencana RCEP akan menggabungkan sekitar 45 juta penduduk di ASEAN dengan pasar di negara mitra, sekaligus menjadikan pasar sebanyak 3,5 miliar jiwa. Dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian ASEAN tumbuh sekitar lima persen per tahun, di samping terjadinya pertumbuhan kelas menengah. Ong berpendapat ASEAN berpotensi tumbuh lebih tinggi, jika

negara-negara anggotanya kembali mengkonsolidasikan kepengaruhannya. Berdasar agenda MEA, solusi pertumbuhan ekonomi yang stabil, sukSES, dan yang memuat Outputnya lebih

mendapat perhatian adalah bonus demografi yang bakal dimiliki ASEAN. Menurutmu, bonus demografi ini perlu dimanfaatkan sejak dini dengan kebijakan yang tepat.



Cetak biru MEA 2025 sudah mengaitkan arahan strategi pengembangan dan integrasi perekonomian di kawasan, setidaknya sangat perlu diwujudkan. Meresolusikan arahan strategi itu jalan bukan pekerjaan mudah. Jika negara-negara anggota mampu mengembangkan dan meningkatkan ekonomi dan perdagangan, bukan ASEAN menjadi pasar tunggal yang sangat kompetitif dan basis produksi global, berpotensi menjadi kekuatan.

Sampai potensi itu benar-benar terwujud, agaknya banyak pihak harus bersabar. MEA belum sempurna. Perjanjian yang sudah ditandatangani beberapa tahun yang lalu, proses panjang tersebut. ASEAN memang sudah memasuki usia emas 50 tahun. Namun, bersamaan dengan itu, ASEAN pun baru sekitar dua tahun melangkah menuju integrasi ekonomi. Masih teramat panjang jalan yang harus ditempuh menuju MEA sesungguhnya.

kawasan yang berpotensi muncul sebagai sebuah kekuatan ekonomi dunia, maka itu adalah Asia Tenggara. Jika Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) diperhitungkan sebagai satu negara, mungkin kawasan ini sudah berada di jajaran sepuluh besar perekonomian dunia. Apalagi, sejak 2015 lalu, ASEAN sudah pula menggulirkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), sebagai langkah awal integrasi ekonomi di kawasan. Hanya saja, sampai sekitar dua tahun berjalan, MEA terkesan masih berjalan di tempat

Hashtag Berita :
 #MasyarakatEkonomiAsean #StabilitasEkonomiIndonesia #MoneterKeuanganNegara
 #EkonomiGlobal #BonusDemografi #PerdaganganDunia #KawasanEkonomiKhusus

EKONOMI TETAP BERPELUANG TUMBUH DI ATAS 5,2%

Harian Umum Sore
MEMIHAK KEBENARAN

SUARA PEMBARUAN

Senin
BERITA SATU MEDIA HOLDINGS
14 Agustus 2017

Ekonomi Tetap Berpeluang Tumbuh di Atas 5,2%

[JAKARTA] Di tengah sejumlah tekanan dari domestik maupun global, perekonomian Indonesia tetap menyimpan peluang untuk tumbuh di atas 5,2% pada tahun ini. Proyeksi pertumbuhan ekonomi optimistis ini bisa diwujudkan jika pemerintah mampu mengefektifkan kebijakan fiskal sebagai instrumen *countercyclical economic policy*, misalnya penciptaan banyak lapangan kerja melalui proyek-proyek pemerintah maupun Dana Desa, serta memanfaatkan semaksimal mungkin momentum pulihnya ekonomi negara mitra dagang dengan mendorong ekspor nonmigas.

Peluang untuk tumbuh di atas 5,2% itu juga disokong oleh prospek ekonomi yang membaik karena beberapa pengeluaran yang tertunda pada semester I-2017 akan dilakukan pada semester II-2017. Pengeluaran pemerintah yang pada triwulan II-2017 tumbuh negatif diyakini akan meningkat lebih tinggi karena akselerasi pengeluaran belanja barang pemerintah akan dieksekusi. Selain itu, pengeluaran rumah tangga terutama konsumen menengah-atas akan lebih baik dari semester lalu, dengan syarat kepercayaan konsumen membaik.

Demikian benang merah pandangan dari sejumlah sumber baik pejabat pemerintah, akademisi, maupun ekonom yang disampaikan pada kesempatan terpisah, pekan lalu. Mereka adalah Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) Ari Kumoro, Head of Industry and Regional Research Department Office of Chief Economist PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Dendi Ramdani, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhanegara, dan Ekonom PT Bahana Sekarbas Fakhral Fauzan.

Suahasil optimistis, ekonomi Indonesia pada semester II-2017 bisa tumbuh lebih baik dari semester I-2017, sehingga target pertumbuhan ekonomi tahun ini yang dalam APBN-P ditetapkan 5,2% masih bisa tercapai. "Kami tentu antusias biar pertumbuhan ekonomi membaik pada semester II. Inflasi juga akan terjaga dan bisa tidak terlalu tinggi, sehingga daya beli meningkat. Kami masih yakin, pada tahun ini pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5,2%," kata dia.

Selain rendahnya laju inflasi yang hingga Juli 2017 berada di sekitar 2,6%, menurut Suahasil, perekonomian yang membaik itu didulang oleh perilaku belanja masyarakat. Ia memantikan, konsumsi pemerintah yang tumbuh negatif pada triwulan II-2017 pun bisa memberikan kontribusi yang positif pada semester II-2017.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ekonomi Indonesia pada triwulan II-2017 tumbuh sebesar 5,01% (*year on year*) yang didukung oleh membaiknya kinerja investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Dengan pertumbuhan yang sama pada triwulan sebelumnya, maka secara kumulatif pertumbuhan ekonomi pada semester I-2017 tercatat mencapai 5,01%.

BPS menyebutkan, pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2017 itu didukung oleh PMTB yang tumbuh 5,35%, konsumsi rumah tangga yang meningkat 4,95%, ekspor naik 3,36%, impor turibus 0,55%, serta konsumsi LNPR (lembaga non-profit rumah tangga) naik 8,49%. Sementara itu, pada periode yang sama konsumsi pemerintah justru tumbuh negatif 1,93%.

Sementara dengan Suahasil, menurut Dendi, tak hanya dari pengeluaran rumah tangga konsumen menengah-atas, sokongan terhadap pertumbuhan ekonomi pada semester II-2017 juga akan datang dari belanja yang meningkat dari kelompok masyarakat bawah. Pasalnya, pada periode ini, penyaluran subsidi ma-

kan (*food subsidy*) sebagai penganti Program Raskin diperkirakan memiliki pencapaian yang jauh lebih baik.

Tiga Faktor
Lebih rinci Dendi memaparkan faktor-faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi bisa maksimal (optimistis) atau sebaliknya, lebih rendah (pesimistis). Pertama, bagaimana mengefektifkan pengeluaran pemerintah sehingga disbursement tinggi tapi dibalanskan secara berkualitas dan efisien.

Kedua, bagaimana proyek-proyek pemerintah seperti proyek infrastruktur bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak dan program Dana Desa bisa efektif menjadi katalisator yang mampu menggerakkan ekonomi desa dan membuka lapangan kerja di desa. Ketiga, bagaimana pengeluaran subsidi untuk rakyat miskin dan bantuan-bantuan sosial bisa mencapai target sasaran rakyat miskin. [ID/E-8]

Sejumlah tekanan dari domestik maupun global, perekonomian Indonesia tetap menyimpan peluang untuk tumbuh di atas 5,2% pada tahun ini. Proyeksi pertumbuhan ekonomi optimistis ini bisa diwujudkan jika pemerintah mampu mengefektifkan kebijakan fiskal sebagai instrumen *countercyclical economic policy*, misalnya penciptaan banyak lapangan kerja melalui proyek-proyek pemerintah maupun Dana Desa, serta memanfaatkan semaksimal mungkin momentum pulihnya ekonomi negara mitra dagang dengan mendorong ekspor nonmigas. Peluang untuk tumbuh di atas 5,2% itu juga disokong oleh prospek ekonomi yang membaik karena beberapa pengeluaran yang tertunda pada semester I-2017 akan dilakukan pada semester II-2017. Pengeluaran pemerintah yang pada triwulan II-2017 tumbuh negatif diyakini akan meningkat lebih tinggi karena akselerasi pengeluaran belanja barang pemerintah akan dieksekusi. Selain itu, pengeluaran rumah tangga terutama konsumen menengah-atas akan lebih baik dari semester lalu, dengan syarat kepercayaan konsumen membaik.

Hashtag Berita :

#PasarModal #BursaSaham #MoneterKeuanganNegara #KebijakanFiskal
#PaketKebijakanEkonomiNasional #PertumbuhanEkonomiNasional #Investasi
#PelaksanaanProyekNasional #StabilitasEkonomiIndonesia #APBNPerubahan #DuniaKerja

KETIMPANGAN EKONOMI, PEMERINTAH BUTUH DUKUNGAN MASYARAKAT

Harian Umum Sore MEMBAK KEBENARAN

SUARA PEMBARUAN

Senin BERITA SATU MEDIA HOLDINGS 14 Agustus 2017

Ketimpangan Ekonomi, Pemerintah Butuh Dukungan Masyarakat

[JAKARTA] Dalam mengatasi masalah ketimpangan ekonomi dan kemiskinan, Pemerintah perlu bekerja dengan agresif. Pemerintah membutuhkan partisipasi masyarakat. Kemiskinan dan ketimpangan ekonomi merupakan masalah bersama. Oleh karena itu, pemerintah memerlukan dukungan dan kerja sama atau kolaborasi dengan semua kalangan seperti LSM, akademisi, pemerintah daerah, swasta dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam Closing Remarks Indonesia Development Forum (IDF) 2017, di Jakarta, pekan lalu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menekankan perlunya peran swasta guna mempercepat pengurangan angka kemiskinan dan mengatasi ketimpangan.

Demikian pula dengan pemerintah daerah, karena apapun programnya, pada akhirnya dieksekusi di daerah. Selanjutnya, Bambang Brodjonegoro juga mengatakan pemerintah akan fokus memperbaiki taraf hidup 40% penduduk terbawah dalam struktur ekonomi. Itu artinya, intervensi pemerintah akan difokuskan pada kelompok masyarakat tersebut.

Saat ini, pemerintah punya komitmen yang kuat dalam mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan. Setidaknya, hal tersebut tertuang dalam Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Pada 2019, tingkat kemiskinan diharapkan dapat turun menjadi 7-8% dari angka baseline 11,22% pada 2015. Demikian pula, angka ketimpangan diupayakan menurun dari 0,408 pada 2015 menjadi 0,36 pada akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Selama dua hari pelaksanaan IDF yang dihadiri sekitar 1.500 peserta dengan latar belakang yang berbeda-beda, Bambang menerima usulan agar kebijakan pemerintah mempertimbangkan aspek kewilayahan, konteks sosial, budaya, kearifan lokal, inklusi gender, dan kelompok berkebutuhan khusus untuk pertumbuhan yang lebih inklusif. [U-5]

Dalam mengatasi masalah ketimpangan ekonomi dan kemiskinan, Pemerintah perlu bekerja dengan agresif. Pemerintah membutuhkan partisipasi masyarakat. Kemiskinan dan ketimpangan ekonomi merupakan masalah bersama. Oleh karena itu, pemerintah memerlukan dukungan dan kerja sama atau kolaborasi dengan semua kalangan seperti LSM, akademisi, pemerintah daerah, swasta dan pemangku kepentingan lainnya.

Hashtag Berita :

#ProgramKemiskinan #RPJMN #DayaBeliMasyarakat #StabilitasEkonomiIndonesia
#KementerianPPN/Bappenas #PertumbuhanEkonomiNasional #KesejahteraanMasyarakat
#KawasanEkonomiKhusus #KearifanLokal